

LAPORAN 2024



PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

DINAS SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS SOSIAL

Jalan : Cut Nyak Dhien No. 01 Telepon 0541 – 661049, 661616 Kode Pos 75512

Email : dinsos@kukarkab.go.id Website : <https://dinsos.kukarkab.go.id>

Tenggarong, 10 Januari 2024

Nomor : B - 29 /DINSOS/SET.I/405.2/01/2024

Lampiran : -

Hal : Laporan Penilaian Risiko dan
Rencana Tindak Pengendalian
Risiko Tahun 2024

Yth. Bupati Kutai Kartanegara

di

Tenggarong

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Penilaian Risiko Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2018 Pasal pada pasal 13 disebutkan pada ayat (1) “ Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas; a) identifikasi Risiko, dan analisis Risiko; (3) Dalam rangka Penilaian Risiko Sebagaimana pada ayat (1); Pimpinan Instansi Menetapkan: a) Tujuan Instansi pemerintah; b) Tujuan pada tiap tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku. Dan selanjutnya dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2013 pada pasal 17 yaitu “Identifikasi risiko dilaksanakan dengan; (a) menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif; (b) menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan (c) menilai faktor lain yang dapat meningkatkan



risiko”. dan pada Pasal 18 yaitu (a) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. (b) Pimpinan SKPD menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Untuk meminimalisasi ketidakpastian yang terjadi dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara maka sasaran strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan wajib dilakukan pengelolaan risiko mulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko dan menyusun rencana tindak pengendalian risiko, pemantauan pengendalian dan reviu dan Menyusun pelaporan hasil pelaksanaan dan melaksanakan komunikasi dan konsultasi, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis Perangkat daerah dan Rencana Kerja Tahun 2024.

Hasil penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko tersebut sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 dilaporkan kepada Bupati Kutai Kartanegara setelah dilaksanakan kegiatan perencanaan dan penganggaran APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.2 Tujuan Penilaian Risiko dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian

Risiko:

Tujuan pelaksanaan Penilaian Risiko dan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Menetapkan konteks/tujuan urusan wajib/urusan pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko, menetapkan kriteria, skala dampak, skala kemungkinan dan tingkat risiko yang dapat diterima.
2. Mengidentifikasi risiko sesuai dengan proses bisnis kegiatan pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kegiatan.
3. Melakukan analisis risiko, dengan menganalisis dampak, kemungkinan dan menentukan skala risiko, melakukan evaluasi dan menentukan prioritas Risiko.

4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian Risiko untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian, merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, Menyusun rancangan informasi dan komunikasi dan rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Memberikan masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses pengambilan keputusan.

1.3 Dasar Pelaksanaan

Dasar Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 7):
5. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 22):
6. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

7. SNI 8615 ISO 31000 Manajemen Risiko-Prinsip-Prinsip dan Pedoman.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Pengelolaan Risiko Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada risiko strategis dan risiko operasional sesuai dengan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara .

1.5 Sistematika

Sistematika dokumen manajemen risiko antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan antara lain; (1) Latar belakang mengenai pentingnya pengelolaan Risiko **Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara** mulai dari proses identifikasi, analisis dan penyusunan rencana tindak pengendalian risiko dan pemantauan pelaksanaan pengendalian yang dirumuskan sesuai dengan tujuan, sasaran, dan indikator strategis, program, dan kegiatan dan indikatornya pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara ; (2) Dasar Hukum Pelaksanaan memaparkan dasar pelaksanaan penugasan Pendampingan Manajemen Risiko pada Penyusunan Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2024 dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Risiko Tahun 2024 . (3) Tujuan yaitu menguraikan tujuan pelaksanaan pedampingan manajemen risiko pada penyusunan Risk Register, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2024 dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Risiko Tahun 2024 ; (4) Ruang Lingkup memaparkan ruang lingkup pelaksanaan pedampingan manajemen risiko pada penyusunan Risk Register, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2024 dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Risiko Tahun 2024 ; dan (5) Sistematika memaparkan tata urutan susunan laporan pedampingan manajemen risiko pada penyusunan Risk Register, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Risiko Tahun 2024 dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Pengendalian Risiko Tahun 2024 .

BAB II PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO



Memaparkan tentang Konteks Manajemen Risiko Inspektorat Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi visi misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kriteria,
BAB III PENILAIAN RISIKO TAHUN 2024

Memaparkan proses Penilaian Risiko meliputi; identifikasi dampak, identifikasi kemungkinan, analisis dampak dan kemungkinan, evaluasi tingkat resiko, penentuan peta risiko serta dan perangkingan prioritas risiko.

Bab IV RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO TAHUN 2024

Memaparkan konsep perlakuan risiko yang telah dievaluasi yang merumuskan keputusan respon terhadap risiko dan rekomendasi pengemabihan kebijakan guna mengantisipasi dan menindaklanjuti ketika risiko terjadi.

BAB V MONITORING TAHUN 2024

Memaparkan kerangka monitoring dan reuiu pelaksanaan manajemen risiko.

BAB VII PENUTUP

Memberikan kesimpulan tentang pelaksanaan penilaian dan penyusunan rencana tindak pengendalian Risiko, sebagai pedoman pengelolaan risiko Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II PENETAPAN KONTEKS MANAJEMEN RISIKO

2.1 Konteks Manajemen Risiko Perangkat Daerah

Konteks Manajemen Risiko mengacu pada Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

a. Visi dan Misi Inspektorat

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 dirumuskan Visi sebagai berikut:

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Berbahagia”

Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 Sebagai Berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani
2. Meningkatkan Pembangunan SDM Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

b. Tujuan dan Sasaran Organisasi Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Indikator Tujuan Perangkat Daerah adalah

Tabel

Indikator Tujuan Perangkat Daerah dan Target Tahun 2024

No.	Indikator Tujuan	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	96,00 %

Sasaran organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah :

1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial
2. Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran).

Tabel

Indikator Kinerja Utama dan Target Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	79 (A)
2	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	96,00 %

c. Program dan Kegiatan Inspektorat dan Indikator Output

Dalam mewujudkan sasaran pada tahun anggaran 2024 , Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Kutai Kartanegara disusun program dan kegiatan dengan indikator hasil (output) sesuai Tabel berikut

:

Tabel
Program , Kegiatan, Sub Kegiatan , Indicator, Target dan
Anggaran Tahun 2024



No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 (BB)	21.437.197.857,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian	18 Dok	500.000.000,00
	(1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	200.000.000,00
	(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dok	100.000.000,00
	(3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	200.000.000,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan pada Dinas Sosial	12 Bulan	10.200.247.534,00
	(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/Bulan	11.482.027.460,00
	(2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Bulan	325.000.000,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	4 Dok	189.460.000,00
	(1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Dok	89.460.000,00
	(2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	100.000.000,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Data Kepegawaian Dinas Sosial	2 Dok	40.000.000,00
	(1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut KelengkapannyaKepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	157 Paket	280.000.000,00
	(2) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dok	100.000.000,00
	(3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	200.000.000,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	8 Layanan	1.402.000.000,00
	(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	60.000.000,00
	(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	97.000.000,00
	(3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	150.000.000,00
	(4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	295.000.000,00
	(5) Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket	150.000.000,00
	(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	300.000.000,00

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator	Target	Anggaran
	(7)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	300 Dok	250.000.000,00
	(8)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	100.000.000,00
6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan	100 %	2.944.981.821,00
	(1)	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	215 Paket	540.832.000,00
	(2)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	2.404.149.821,00
7		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.293.878.576,00
	(1)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	8.000.000,00
	(2)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	316.485.288,00
	(3)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	969.393.288,00
8		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2.719.850.000,00
	(1)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32 Unit	470.000.000,00
	(2)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	300.000.000,00
	(3)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	75.000.000,00
	(4)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.500.000.000,00
	(5)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	41 Unit	374.850.000,00
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88 %	7.814.000.000,00

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator	Target	Anggaran
1	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Meningkatnya pengetahuan lembaga atau perorangan dalam tata cara penyelenggaraan undian dan pengumpulan sumbangan	50 Orang	75.000.000,00
	(1)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gras Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dok	75.000.000,00
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		Persentase PSKS yang dikembangkan	88 %	7.793.000.000,00
	(1)	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	200.000.000,00
	(2)	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18 Orang	750.000.000,00
	(3)	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	237 Lembaga	6.739.000.000,00
	(4)	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	50.000.000,00
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan	100 %	100.000.000,00
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	100 Orang	100.000.000,00
	(1)	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	100 Orang	100.000.000,00
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang	100 %	5.859.089.590,00

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator	Target	Anggaran
			terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		Terpenuhinya pelayanan terhadap kelompok PMKS di luar panti	3071 Orang	5.144.089.590,00
	(1)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1491 Orang	3.235.700.950,00
	(2)	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	250.000.000,00
	(3)	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	230 Orang	600.000.000,00
	(4)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	150.000.000,00
	(5)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	733.389.000,00
	(6)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.000,00
	(7)	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	100.000.000,00
2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	750 Orang	715.000.000,00
	(1)	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	100.000.000,00
	(2)	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200.000.000,00
	(3)	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	80.000.000,00
	(4)	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	60.000.000,00

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator	Target	Anggaran
	(5)	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,00
	(6)	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,00
	(7)	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dok	75.000.000,00
V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	100 %	6.886.340.000,00
			Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85 %	
	1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terpeliharanya anak-anak terlantar	25 Orang	645.640.000,00
	(1)	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	645.640.000,00
	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola	2 Dok	6.240.700.000,00
	(1)	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	194893 Orang	380.000.000,00
	(2)	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40919 KK	369.850.000,00
	(3)	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	2368 KK	4.500.000.000,00
	(4)	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	990.850.000,00
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100 %	1.050.000.000,00
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 KK	550.000.000,00
	(1)	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 KK	300.000.000,00
	(2)	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat	500 Orang	250.000.000,00

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator	Target	Anggaran
			(Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota		
2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		Terlaksananya Kampung Siaga Bencana	4 Kampung	500.000.000,00
	(1)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kampung	100.000.000,00
	(2)	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	24 Orang	400.000.000,00
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Persentase TMP yang dikelola	100 %	1.450.000.000,00
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		Jumlah TMP yang dipelihara	2 Lokasi	1.450.000.000,00
	(1)	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dokumen	1.350.000.000,00
	(2)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	100.000.000,00
		Jumlah			44.596.627.447,00

d. Pengelola Manajemen Risiko

Dalam pelaksanaan pengelolaan Risiko pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, telah dibentuk Unit Pengelola Risiko (UPR)/Tim Satgas Manajemen Risiko pada Tahun 2022 -2024 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-298/DINSOS/SET.II/900/04/2022 tanggal 12 April 2022 dan telah dirubah menjadi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-905/DINSOS/SET.II/900/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dengan susunan sebagai berikut:

Tabel.

Susunan Unit Pengelola Risiko Dinas Sosial Kabupaten Kutai
Kartanegara

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	H. Hamly, SE	Kepala Dinas Sosial	Penanggung Jawab
2	Drs. Yuliandris Suherdiman	Sekretaris	Ketua Tim Kerja
3	Zein Wahyudi Pasa, SP	Perencana Muda	Asesor 1
4	Samuel Haposan Banjarnahor, A.Md. Ak	Verifikator Keuangan	Asesor 2
5		Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
6	Sunarko, S.ST., M.Si	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7	Riadi Hadiwinoto, S.Hut	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	Anggota
8	Suharningsih, SH., MM	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial	Anggota
9	Serapul Anam, SE., MM	Kasub Bag Umum Tatalakasana	Anggota
10	Mohd. Ery Faisal, S.Sos., M.Si	Analisis SDM Apartur	Anggota
11	Emi Mariati	Pengolah Data	Anggota

Tugas Unit Pengelola Risiko Tim pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- 1) melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing.
- 2) melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
- 3) Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang.
- 4) Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
- 5) Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko.

6) Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

2.2 Pengendalian Intern Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan pengelolaan Manajemen Risiko Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara telah disusun Kriteria Efektivitas Pengendalian Intern pada Standar Operasional Prosedur untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan kriteria efektivitas pengendalian sesuai Tabel berikut:

Tabel
Kriteria Efektifitas Sistem Pengendalian Internal

Deskripsi	Kriteria		Keefektifan
	Desain	Operasional	
Kontrol bersifat preventif, dapat dioperasikan dan dilaksanakan secara konsisten. Perlu dipantau karena terpengaruh perubahan kondisi	Ya	Ya	Efektif
Kontrol mencakup sebagian dari kebutuhan. Jika desain bagus operasional sebagian	Ya Tidak	Tidak Ya	Sebagian efektif
Baik desain maupun operasional dari kontrol yang ada tidak memadai. Perlu didesain ulang untuk perbaikan atau ganti baru.	Tidak	Tidak	Tidak efektif.

2.3 Penetapan Kriteria Penilaian Risiko

Penetapan Kriteria Penilaian Risiko Bertujuan Memberikan Pemahaman Yang Sama Bagi Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pengelolaan Risiko Di Lingkup Pemerintah Daerah Mengenai Kriteria Penilaian Dan Analisis Atas Risiko-Risiko Yang Telah Diidentifikasi, Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Mengenai Tingkat Risiko Yang Dapat Diterima Maupun Tingkat Risiko Yang Tidak Dapat Diterima Dan Memerlukan Respon Penanganan Lebih Lanjut. Kriteria Penilaian Risiko Terdiri 3 Komponen, Yaitu Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, Skala Dampak Risiko, Dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

a. Skala Kemungkinan

Tabel
Skala Kemungkinan (Probabilitas) Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Hampir pasti terjadi/Sangat sering	5	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat sering (lebih dari 70%, atau lebih dari 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan besar	4	Kemungkinan terjadinya Risiko sering (sebesar 51 – 70% atau 5 sampai dengan 7 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan sedang	3	Kemungkinan terjadinya Risiko sedang (sebesar 31 – 50% atau 3 sampai dengan 5 kali dalam 5 Tahun)
Kemungkinan kecil/Jarang	2	Kemungkinan terjadinya Risiko rendah/kecil (sebesar 11% - 30% atau 1 sampai dengan 3 kali dalam 5 Tahun)
Sangat Jarang	1	Kemungkinan terjadinya Risiko sangat kecil (sebesar 0 – 10% atau 1 kali dalam 5 Tahun)

b. Skala Dampak

Tabel
Skala Dampak Risiko

Level Dampak	Area Dampak				
	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Gangguan Terhadap Layanan Organisasi	Tuntutan Hukum
Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara \leq Rp1 Juta	Keluhan secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya \leq 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja \geq 100%	Pelayanan tertunda \leq 1 hari	Jumlah tuntutan hukum \leq 5 kali dalam satu periode
Minor (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp1 Juta s.d Rp5 Juta	Keluhan secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya lebih dari 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda di atas 1 hari s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu periode
Moderat (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp5 Juta s.d Rp10 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d 80%	Pelayanan tertunda di atas 5 hari s.d 15 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp10 Juta s.d Rp. 50 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp. 50 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja \leq 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu periode.

3. Skala Nilai Risiko

Tabel
Skala Nilai Risiko

Kategori Dampak	Kriteria untuk Penerimaan Risiko
1-5 (Sangat Rendah)	Dapat diterima
6-10 (Rendah)	Dapat diterima
11-15 (Sedang)	Harus menjadi perhatian manajemen dan diperlukan pengendalian yang baik
16-20 (Tinggi)	Tak dapat diterima, diperlukan pengendalian yang sangat baik
21-25 (Sangat Tinggi)	Tidak dapat diterima atau ditolak, diperlukan pengendalian yang sangat kuat dan sangat baik

4. Pemetaan Tingkat Risiko

Gambar
Matriks Peta Risiko

Matriks Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

5. Pengelompokan Prioritas Penanganan Risiko

Tabel

Pengelompokan Prioritas Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Kartanegara

Skala	Warna	Tingkat	Prioritas
1 -5	Hijau	Sangat Rendah	5
6 – 8	Hijau Muda	Rendah	4
9 – 12	Kuning	Sedang	3
15 – 20	Jingga	Tinggi	2
20 - 25	Merah	Sangat Tinggi	1

6. Tingkat Risiko, Selera Risiko, Toleransi Risiko dan Tindakan Eskalasi
Penanganan Risiko

Tabel

Kriteria Tingkat Risiko Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara
Kabupaten Kutai Kartanegara

Tingkat Risiko	Selera Risiko	Toleransi Risiko	Tindakan Eskalasi
Sangat Tinggi	Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan responsif.	Risiko tidak dapat diterima dan ditoleransi dan perlakuan risiko perlu dikaji ulang untuk perbaikan atau penambahan perlakuan atau ganti yang baru.	Perlu perhatian Dewan Pengawas organisasi dan Pengendalian dapat dieskalasi kepemimpinan organisasi dan didukung dengan rencana penanganan terinci.
Tinggi	Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian baik preventif maupun respontif.		Perlu perhatian pimpinan organisasi, pengendalian eskalasi kepemimpinan manajemen senior organisasi dan didukung rencana rinci
Sedang	Risiko tidak dapat diterima dan perlu dilakukan pengendalian terutama tindakan preventif.		Pengendalian dieskalasi ke manajer senior selaku pemilik risiko dan didukung dengan rencana rinci.
Rendah	Risiko tidak dapat diterima, namun perlakuan pengendalian hanya dilakukan jika manfaat yang diterima lebih besar dari biayanya	Risiko tidak dapat diterima tapi dapat ditoleransi sepanjang secara praktek menguntungkan .	Pengendalian cukup dengan Manajer Bidang sesuai dengan kebijakan dan SOP yang berlaku.
Sangat Rendah	Risiko dapat diterima sehingga tidak perlu perlakuan, cukup kontrol yang ada, tapi perlu dimonitor oleh pemilik risiko.	Risiko dapat diterima dan ditoleransi sehingga tidak perlu perlakuan, cukup dengan kontrol yang ada dan dimonitor oleh pemilik risiko.	Pertahankan pengendalian yang ada dan monitor tingkat keterjadian risiko untuk perlakuan risiko.

BAB III PENILAIAN RISIKO

3.1 Identifikasi Risiko

3.1.1 Risiko Strategis Perangkat Daerah

Hasil identifikasi Risiko menurut Sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kutai

Kartanegara pada tahun 2024 berikut:

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
1	Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	96,00%	44.596.627.447,00							
1.1	Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar	Persentase PMKS yang tertangani Pemenuhan dan Pelayanan Kebutuhan Dasarnya	96,00%		RS1	Data PMKS tidak terverifikasi dan valid	Keterbatasan kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Sosial	Internal & Eksternal	UC/C	Rendahnya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada PMKS	Kepala Dinas / PMKS
1.2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Meningkatnya transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	79 (BB)		RS 2	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan	Rendahnya kemampuan ASN Dinas Sosial dalam mengimplementasikan SAKIP	Internal	C	Tidak tercapainya nilai SAKIP yang menjadi target Dinas Sosial	Kepala Dinas / ASN Dinas Sosial

3.1.2 Risiko Operasional Program Perangkat Daerah

Hasil identifikasi Risiko Program Dinas Sosial Kabupaten Kutai

Kartanegara pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja	79 (BB)	121.437.197.857,00	RPROG 1	Penyusunan LKJIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan	Rendahnya kemampuan ASN Dinas Sosial dalam mengimplementasikan SAKIP	Internal	C	Tidak tercapainya nilai SAKIP yang menjadi target Dinas Sosial	Kepala Dinas
2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	88%	7.814.000.000,00	RPROG 2	Petugas PSKS kurang aktif dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial	Kurangnya peningkatan kapasitas PSKS	Internal dan Eksternal	UC/C	Kurangnya peran PSKS dalam Usaha Kesejahteraan Sosial	Kepala Dinas / Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	100%	100.000.000,-	RPROG 3	Warga migran bermasalah yang tidak dapat dipulangkan	Terbatasnya sumber daya yang dimiliki	Internal dan Eksternal	UC/C	Meningkatnya jumlah orang terlantar di Kutai Kartanegara	Kepala Dinas / Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
4	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial	100%	5.859.089.590,00	RPROG 4	Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial yang tidak terpenuhi	Data PMKS yang belum terverifikasi dan valid ; terbatasnya sumber daya yang dimiliki ; tidak tersedianya pangan, sandang dan alat bantu yang akan berikan kepada penerima manfaat	Internal dan Eksternal	UC/C	Meningkatnya angka PMKS yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kepala Dinas / Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	6.886.340.000,00	RPROG 5	PMKS yang tidak memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial	Data PMKS yang belum terverifikasi dan valid ; terbatasnya sumber daya yang dimiliki	Internal dan Eksternal	UC/C	Meningkatnya angka PMKS yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya	Kepala Dinas / Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat	100%								

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
		Miskin Non Potensial									
6	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100%	1.050.000.000,00	RPROG 6	Korban bencana yang tidak terpenuhi layanan dasarnya	Terbatasnya sumber daya yang dimiliki ; tidak tersedianya pangan, sandang yang akan berikan kepada penerima manfaat	Internal dan Eksternal	UC/C	Korban bencana alam dan sosial yang tidak mendapatkan bantuan	Kepala Dinas / Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang di kelola	100%	1.450.000.000,00	RPROG 7	TMP yang tidak terpelihara	Pelaksanaan pemeliharaan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan	Internal	C	Kerusakan TMP yang merupakan asset daerah	Kepala Dinas / Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

3.1.3 Risiko Operasional Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Hasil identifikasi Risiko Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dok	200.000.000,-	RSUBK 1	Terlambatnya penyelesaian Dokumen Perencanaan	Bahan dan Data untuk penyusunan dokumen belum tersedia	Internal	C	Keterlambatan dalam proses penyusunan RKA / DPA	Sekretaris/PPTK
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dok	100.000.000,-	RSUBK 2	Laporan Berkala Belum Memberikan Keyakinan Yang Wajar	Laporan Terlambat Dikumpulkan	Internal	C	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris/PPTK
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	200.000.000,-	RSUBK 3	Laporan Evaluasi Kinerja Yang Tidak Tersedia	Bahan dan Data Evaluasi Kinerja Belum Tersedia	Internal	C	Tidak Terukurnya Kinerja Dinas Sosial	Sekretaris/PPTK
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	11.482.027.460,-	RSUBK 4	Gaji dan Tunjangan ASN yang tidak terbayarkan	Adanya Penambahan Pegawai, Perubahan Regulasi dan Hilangnya data	Eksternal dan Internal	C	Menurunnya kinerja ASN	Sekretaris/PPTK



No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
							Base Pegawai /ASN				
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Bulanan/Triulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	12 Bulan	325.000.000,-	RSUBK 5	Laporan Berkala Belum Memberikan Keyakinan Yang Wajar	Laporan Terlambat Dikumpulkan	Internal	C	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris/PPTK
6	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen	4 Dok	89.460.000,-	RSUBK 6	Laporan BMD yang tidak valid	Asset yang tidak tercatat	Eksternal dan Internal	UC	Pemerintah Daerah Kesulitan Konsolidasi Laporan Keuangan	Sekretaris/PPTK
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	100.000.000,-	RSUBK 7	Asset yang tidak terdata					
8	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	157 Paket	280.000.000,-	RSUBK 8						
9	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 Dok	100.000.000,-	RSUBK 9	Data ASN yang tidak update	Belum semua data ASN terkumpul menjadi database	Internal	C	Tidak dapat meningkatkan SDM	Sekretaris/PPTK
10	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	200.000.000,-	RSUBK 10			Internal	C	Tidak dapat meningkatkan SDM	Sekretaris/PPTK
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	5 Paket	60.000.000,-	RSUBK 11	Pencahayaan ruangan kerja dan lingkungan kantor tidak baik	Tidak tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan	Internal	C	Tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik	Sekretaris/PPTK

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
		Bangunan Kantor yang Disediakan g									
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	97.000.000,-	RSUBK 12	Kemampuan OPD yang belum dapat memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	Internal	C	Tidak terpenuhinya Alat Tulis Kantor	Sekretaris/PPTK
13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	20 Jenis	150.000.000,-	RSUBK 13	Kurang terpenuhinya Bahan Logistik Kantor	Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan logistik yang dibutuhkan	Internal	C	Tidak terpenuhinya Logistik Kantor	Sekretaris/PPTK
14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	295.000.000,-	RSUBK 14	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetak dan Penggandaan	Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	Internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan cetakan dan penggandaan	Sekretaris/PPTK
15	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	10 Paket	150.000.000,-	RSUBK 15	Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan / material pendukung kegiatan	Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan material yang dibutuhkan	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan acara yang memerlukan bahan / material	Sekretaris/PPTK
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan	200 Laporan	300.000.000,-	RSUBK 16	Perjalanan dinas yang tidak	Perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan	Internal	C	Pemborosan penggunaan anggaran	Sekretaris/PPTK

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
22	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	316.485.288,-	RSUBK 22	Sanksi Denda / Pemutusan sambungan air, listrik, telepon / internet dan TV kabel	Keterlambatan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Internal	C	Terhambatnya aktivitas / pelayanan / kebutuhan kantor	Sekretaris/PPTK
23	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS	12 Bulan	969.393.288,-	RSUBK 23	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL	Adanya penambahan tenaga harian lepas wakar dan tenaga kebersihan	Internal	C	Kinerja Pegawai Non PNS Kurang Maksimal	Sekretaris/PPTK
24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak	7 Unit	470.000.000,-	RSBK 24	Terhambatnya aktivitas pengguna kendaraan dinas perorangan dan jabatan	Pemeliharaan kerusakan yang tidak dapat diprediksi	Internal	C	Minimnya Kendaraan Dinas Jabatan untuk menunjang Tufoksi OPD	Sekretaris/PPTK
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan dan Pajak	29 Unit	300.000.000,-	RSUBK 25	Tidak maksimalnya pelayanan di lapangan	Kendaraan dinas operasional / lapangan yang tidak terpelihara	Internal	C	Minimnya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan untuk menunjang Tufoksi OPD	Sekretaris/PPTK
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	75.000.000,-	RSUBK 26	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan peralatan / mesin	Peralatan dan mesin yang tidak dipelihara/dirawat	Internal	C	Kerusakan peralatan dan mesin	Sekretaris/PPTK
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 Unit	1.500.000.000,-	RSUBK 27			Internal	C		Sekretaris/PPTK

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
		yang Dipelihara/Direhabilitasi									
28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	41 Unit	374.850.000,-	RSUBK 28			Internal	C		Sekretaris/PPTK
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gras Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dok	75.000.000,-	RSUBK 29	Tidak terbitnya Izin Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kurangnya sosialisasi terkait izin undian dan pengumpulan uang atau barang	Ekseternal dan Internal	UC	Pelaksanaan undian dan pengumpulan uang atau barang yang tidak tertib	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK
30	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	200.000.000,-	RSUBK 30	Kurangnya kemampuan SDM Pekerja Sosial Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PSKS perorangan	Belum maksimalnya pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan kapasitas SDM Pekerja Sosial	Ekseternal dan Internal	UC	Belum maksimalnya penyelesaian masalah kesejahteraan sosial	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK
31	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan	20 Orang	750.000.000,-	RSUBK 31	Kurangnya kemampuan SDM TKSK dalam melaksanakan tugas dan	Belum maksimalnya pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan	Ekseternal dan Internal	UC	Belum maksimalnya penyelesaian masalah kesejahteraan sosial	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK



No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
		Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				fungsinya sebagai PSKS perorangan	kapasitas SDM TKSK				
32	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	237 Lembaga	6.739.000.000,-	RSUBK 32	DTKS yang belum terverifikasi dan di validasi	Kurangnya kemampuan petugas PUSKESOS dalam melakukan pendataan DTKS	Ekseternal dan Internal	UC	Belum maksimalnya penyelesaian masalah kesejahteraan sosial	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK
33	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Sertifikat	50.000.000,-	RSUBK 33	Kurangnya peran LK3 dalam pelayanan konsultasi kesejahteraan keluarga	Belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan LK3	Ekseternal dan Internal	UC	Belum maksimalnya penyelesaian masalah kesejahteraan sosial	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK
34	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan	5 Orang	100.000.000,-	RSUBK 34	Tingginya jumlah warga negara migran yang bermasalah	Tidak terfasilitasinya pemulangan warga negara migran ke daerah asalnya	Ekseternal dan Internal	UC	Meingkatnya permasalahan warga negara migran	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
35	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	800 Orang	3.235.700.590,-	RSUBK 35	Penyediaan makanan tidak tepat waktu	Keterlambatan proses pengadaan permakanan	Ekseternal dan Internal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan permakanan PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
36	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	250.000.000,-	RSUBK 36	Penyediaan sandang tidak tepat waktu	Keterlambatan proses pengadaan sandang	Ekseternal dan Internal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan sandang PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
37	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	600.000.000,-	RSUBK 37	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu	Keterlambatan proses pengadaan alat bantu	Ekseternal dan Internal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan alat bantu bagi disabilitas	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
38	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	150.000.000,-	RSUBK 38	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga	Kurangnya kesadaran keluarga dalam memahami dan menerima kondisi anggota keluarga yang mengalami permasalahan sosial	Ekseternal dan Internal	UC	Meningkatnya putusannya hubungan antara anggota keluarga dengan PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
39	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	118 Orang	733.389.000,-	RSUBK 39	Tingkat kemandirian PMKS yang masih kurang	Rendahnya pemberdayaan PMKS	Ekseternal dan Internal	UC	Kondisi PMKS yang semakin memburuk	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
40	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	75.000.000,-	RSUBK 40	Tingkat Layanan Kedaruratan yang masih kurang	Rendahnya pemberdayaan PMKS	Ekseternal dan Internal	UC	Kondisi PMKS yang semakin memburuk	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
41	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	100.000.000,-	RSUBK 41	Tidak terpenuhinya layanan rujukan bagi PMKS	Data tidak valid	Ekseternal dan Internal	UC	Meningkatnya komplein masyarakat	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
442	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	75.000.000,-	RSUBK 42	Tidak terpenuhinya layanan kedaruratan bagi PMKS	Kejadian kedaruratan yang tidak dapat diprediksi	Ekseternal dan Internal	UC	Meningkatnya komplein masyarakat	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
43	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	200.000.000,-	RSUBK 43	Penyediaan makanan tidak tepat waktu	Keterlambatan proses pengadaan permakanan	Ekseternal dan Internal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan permakanan PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
444	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	80.000.000,-	RSUBK 44	Penyediaan sandang tidak tepat waktu	Keterlambatan proses pengadaan sandang	Ekseternal dan Internal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan sandang PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
45	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	60.000.000,-	RSUBK 45	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu	Keterlambatan proses pengadaan alat bantu	Ekseternal dan Internal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan alat bantu PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
46	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan	100 Orang	100.000.000,-	RSUBK 46	Tingkat kemandirian	Rendahnya pemberdayaan PMKS	Ekseternal dan Internal	UC	Kondisi PMKS yang semakin memburuk	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
		Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				PMKS yang masih kurang					
47	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000,-	RSUBK 47	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga	Kurangnya kesadaran keluarga dalam memahami dan menerima kondisi anggota keluarga yang mengalami permasalahan sosial	Ekseternal dan Internal	UC	Meningkatnya putusannya hubungan antara anggota keluarga dengan PMKS	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
48	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Lembaga	75.000.000,-	RSUBK 48	Tidak terlaksananya rehabilitasi sosial PMKS	Masih kurangnya MoU dengan lembaga-lembaga pelayanan rehabilitasi sosial	Internal	C	Bertambahnya PMKS yang tidak mendapatkan rehabilitasi	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
49	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	645.640.000,-	RSUBK 49	Tidak terlayannya kebutuhan dasar anak terlantar	Keterlambatan proses penjangkauan anak terlantar untuk dimasukan kedalam panti odah ngasoh kanak	Ekseternal dan Internal	UC	Meningkatnya jumlah anak terlantar yang tidak terlayani	Kabid LINJAMSOS / PPTK
50	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	175000 Orang	380.000.000,-	RSUBK 50	DTKS yang belum terverifikasi dan di validasi	Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS	Ekseternal dan Internal	UC	Kesalahan dalam penyusunan perencanaan bantuan sosial bagi keluarga miskin	Kabid Penanganan Fakir Miskin / PPTK

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
51	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	40919 KK	369.850.000,-	RSUBK 51	DTKS yang belum terverifikasi dan di validasi	Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS	Ekseternal dan Internal	UC	Kesalahan dalam penyusunan perencanaan bantuan sosial bagi keluarga miskin	Kabid Penanganan Fakir Miskin / PPTK
52	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1358 KK	4.500.000.000,-	RSUBK 52	Tidak terlasurkannya bantuan sosial	Data penerima manfaat yang belum terverifikasi dan tervalidasi	Ekseternal dan Internal	UC	Meningkatnya angka kemiskinan	Kabid LINJAMSOS / PPTK
53	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	75 Orang	990.850.000,-	RSUBK 53	Tidak terlasurkannya bantuan pengembangan ekonomi	Tambahan pagu anggaran dari pokir pada P-APBD, proses verivali penerima manfaat WRSE terlambat	Ekseternal dan Internal	UC	Meningkatnya angka kemiskinan	Kabid LINJAMSOS / PPTK
54	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 KK	300.000.000,-	RSUBK 54	Penyediaan makanan tidak tepat waktu	Keterlambatan proses pengadaan permakanan	Ekseternal dan Internal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan permakanan korban bencana alam dan sosial	Kabid LINJAMSOS / PPTK
55	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap	500 KK	250.000.000,-	RSUBK 55	Penyediaan sandang tidak tepat waktu	Keterlambatan proses pengadaan sandang	Ekseternal dan Internal	UC	Tidak terpenuhinya kebutuhan sandang korban	Kabid LINJAMSOS / PPTK

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Kode Risiko	Pernyataan Risiko	Sebab Risiko	Sumber Resiko	UC/C	Dampak (Konsekuensi)	Pemilik risiko/ penanggung jawab/ Pihak yg terkena Dampak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
		Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota								bencana alam dan sosial	
56	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Desa	100.000.000,-	RSUBK 56	Kurang optimalnya pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Masing rendahnya SMD dalam pengelolaan kampung siaga bencana	Eksternal dan Internal	UC	Tidak berkembangnya Kampung Siaga Bencana	Kabid LINJAMSOS / PPTK
57	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	400.000.000,-	RSUBK 57	Belum optimalnya kinerja Taruna Siaga Bencana	Kurangnya peningkatan SDM, sarana prasarana serta rewards untuk Taruna Siaga Bencana	Internal	C	Menurunnya pelayanan Taruna Siaga Bencana dalam membantu penanganan bencana	Kabid LINJAMSOS / PPTK
58	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2 Dok	1.350.000.000,-	RSUBK 58	Rusaknya Taman Makam Pahlawan	Tidak terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Internal	C	Kerusakan asset Taman Makam Pahlawan	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK
59	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	2 Makam	100.000.000,-	RSUBK 59	Rusaknya Taman Makam Pahlawan	Tidak terpeliharanya Taman Makam Pahlawan	Internal	C	Kerusakan asset Taman Makam Pahlawan	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK



3.2 Analisis Risiko

Hasil Analisis Risiko Sasaran Strategis Perangkat Daerah sebagai berikut :

Kode Risiko.	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RS 1	Data PMKS tidak terverifikasi dan valid disebabkan oleh Keterbatasan kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Sosial	5	4	20	Tinggi	Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kebutuhan Pelayanan Dasar PMKS	Memadai	Efektif	Ada
RS 2	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan disebabkan oleh Rendahnya kemampuan ASN Dinas Sosial dalam mengimplementasi-kan SAKIP	4	4	16	Tinggi	Menugaskan PNS yang berkompeten untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	Memadai	Efektif	Ada

Hasil Analisis Risiko Program Perangkat Daerah sebagai berikut:

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RPROG 1	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan disebabkan oleh Rendahnya kemampuan ASN Dinas Sosial dalam mengimplementasi-kan SAKIP	4	4	16	Tinggi	Menugaskan PNS yang berkompeten untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	Memadai	Efektif	Ada
RPROG 2	Petugas PSKS kurang aktif dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial	5	4	20	Tinggi	Memberikan fasilitasi kepada PSKS dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial	Memadai	Efektif	Ada
RPROG 3	Warga migran yang tidak dapat dipulangkan disebabkan oleh Terbatasnya sumber daya yang dimiliki	5	4	20	Tinggi	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait pemulangan warga migran bermasalah ke tempat asalnya	Memadai	Efektif	Ada
RPROG 4	Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial yang tidak terpenuhi disebabkan oleh Data PMKS yang belum terverifikasi dan valid ; terbatasnya sumber daya yang dimiliki ; tidak tersedianya pangan, sandang dan alat bantu yang akan berikan kepada penerima manfaat	5	4	20	Tinggi	Sinkronisasi data penerima manfaat bantuan sosial dengan penyalur bantuan	Memadai	Efektif	Ada
RPROG 5	PMKS yang tdk memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial disebabkan oleh	5	4	20	Tinggi	Sinkronisasi data penerima manfaat bantuan sosial dengan penyalur bantuan	Memadai	Efektif	Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
	Data PMKS yang belum terverifikasi dan valid ; terbatasnya sumber daya yang dimiliki								
RPROG 6	Korban bencana yang tidak terpenuhi layanan dasarnya disebabkan oleh Terbatasnya sumber daya yang dimiliki ; tidak tersedianya pangan, sandang yang akan berikan kepada penerima manfaat	5	4	20	Tinggi	Melakukan pengendalian terhadap stockopname / barang persediaan gudang	Memadai	Efektif	Ada
RPROG 7	TMP yang tidak terpelihara disebabkan oleh Pelaksanaan pemeliharaan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan	2	3	6	Sedang	Penerimaan dan sekaligus penempatan tenaga kebersihan / perawatan TMP sesuai dengan kebutuhan	Memadai	Efektif	Ada

Hasil Analisis Risiko Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut :

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RSUBK 1	Terlambatnya penyelesaian Dokumen Perencanaan disebabkan oleh Bahan dan Data untuk penyusunan dokumen belum tersedia	2	3	6	Rendah	1. Melakukan reuiu RENJA. 2. Penyusunan KAK. 3. Mengikuti regulasi terkait perencanaan	Memadai	Efektif	Ada
RSUBK 2	Laporan Sakip, E-Pantau, LPPD belum dapat di nilai dengan baik disebabkan oleh Kurangnya Koordinasi Antar Bidang	2	3	6	Rendah	Rapat pengendalian kinerja internal Dinas Sosial	Memadai	Efektif	Ada
RSUBK 3	Laporan Evaluasi Kinerja tidak tersedia secara berkala	2	3	6	Rendah	Rapat Evaluasi Secara Berkala	Memadai	Efektif	Ada
RSUBK 4	Gaji dan Tunjangan ASN yang tidak terbayarkan disebabkan oleh Adanya Penambahan Pegawai, Perubahan Regulasi dan Hilangnya data Base Pegawai /ASN	2	3	6	Rendah	Koordinasi dengan BPKAD dalam rangka rekonsiliasi gaji dan tunjangan ASN	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 5	Laporan Berkala Belum Memberikan Keyakinan Yang Wajar disebabkan oleh Laporan Terlambat Dikumpulkan	2	3	6	Rendah	Rapat evaluasi internal	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 6	Laporan BMD yang tidak valid disebabkan oleh Asset yang tidak tercatat	3	4	12	Sedang	Penyusunan rekapitulasi belanja modal yang menjadi asset Dinas Sosial per triwulan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 7	Barang Milik Daerah yang tidak tercatat	3	4	12	Sedang	Pencatatan Barang Milik Daerah	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 8	Keterlambatan penyediaan pakaian	2	3	6	Rendah	Percepatan Proses Pengadaan	Memadai	Efektif	Tidak Ada



Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RSUBK 9	Data ASN yang tidak update disebabkan oleh Belum semua data ASN terkumpul menjadi database	3	4	12	Sedang	Memaksimalkan penggunaan aplikasi My SAPK	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 10	Tidak terpenuhinya 20 Jam Pelajaran untuk setiap ASN	3	4	12	Sedang	Membuat Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM ASN	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 11	Pencahayaan ruangan kerja dan lingkungan kantor tidak baik disebabkan oleh Tidak tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan	2	2	4	Sangat Rendah	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 12	Kemampuan OPD yang belum dapat memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	3	3	9	Rendah	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 13	Kurang terpenuhinya Bahan Logisti Kantor disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan logistik yang dibutuhkan	2	2	4	Sangat Rendah	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 14	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetakan dan Penggandaan disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	2	2	4	Sangat Rendah	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 15	Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan / material pendukung kegiatan	2	2	4	Sangat Rendah	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
	disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan material yang dibutuhkan								
RSUBK 16	Perjalanan dinas yang tidak efisien dan efektif disebabkan oleh Perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan	3	3	9	Rendah	Membuat kartu kendali perjalanan dinas	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 17	Kehilangan dokumen arsip yang diperlukan disebabkan oleh Tidak tertatanya arsip pada dinas sosial	3	4	12	Sedang	Pendampingan dari Dinas Kearsipan dalam pengelolaan arsip	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 18	Tidak terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	3	4	12	Sedang	Membuat aplikasi berbasis website	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 19	Kebutuhan meubelair yang tidak tersedia	2	3	6	Rendah	Percepatan Proses Pengadaan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 20	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang tugas dan fungsi dinas disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	3	4	12	Sedang	Membuat Rencana Kebutuhan Barang dan Mesin	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 21	Terlambatnya proses administrasi yang membutuhkan meterai, dll disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta ketersediaan anggaran belanja jasa surat menyurat yang tidak sesuai	2	2	4	Sangat Rendah	Penggunaan bahan surat dan benda pos secara efisien	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RSUBK 22	Sanksi Denda / Pemutusan sambungan air, listrik, telepon / internet dan TV kabel disebabkan oleh Keterlambatan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4	4	16	Tinggi	Melakukan perhitungan ulang kebutuhan sampai akhir tahun	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 23	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL disebabkan oleh Adanya penambahan tenaga harian lepas wakar dan tenaga kebersihan	3	4	12	Sedang	Memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran gaji THL	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 24	Terhambatnya aktivitas pengguna kendaraan dinas perorangan dan jabatan disebabkan oleh Pemeliharaan kerusakan yang tidak dapat diprediksi	4	3	12	Sedang	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan kendaraan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 25	Tidak maksimalnya pelayanan di lapangan disebabkan oleh Kendaraan dinas operasional / lapangann yang tidak terpelihara	4	3	12	Sedang	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan kendaraan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 26	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan perlaatan / mesin disebabkan oleh Peralatan dan mesin yang tidak dipelihara/dirawat	4	3	12	Sedang	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan peralatan dan mesin	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 27	Bangunan Gedung yang mengalami kerusakan	4	4	16	Tinggi	Melakukan Percepatan Proses Pengadaan Jasa Pemeiiharaan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 28	Sarana Prasarana Gedung yang mengalami kerusakan	4	4	16	Tinggi	Melakukan Percepatan Proses Pengadaan Jasa Pemeiiharaan	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RSUBK 29	Tidak terbitnya Izin Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang	3	3	9	Rendah	Melakukan sosialisasi penerbitan izin undian dan pengumpulan uang atau barang	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 30	Kurangnya kemampuan SDM Pekerja Sosial Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PSKS perorangan disebabkan oleh Belum maksimalnya pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan kapasitas SDM Pekerja Sosial	4	4	16	Tinggi	Rapat Koordinasi dengan Pekerja Sosial	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 31	Kurangnya kemampuan SDM KSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PSKS perorangan disebabkan oleh Belum maksimalnya pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan kapasitas SDM TKSK	4	4	16	Tinggi	Rapat Koordinasi dengan TKSK	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 32	DTKS yang belum terverifikasi dan di validasi disebabkan oleh Kurangnya kemampuan petugas PUSKESOS dalam melakukan pendataan DTKS	4	4	16	Tinggi	Rapat Koordinasi dengan PUSKESOS	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 33	Kurangnya peran LK3 dalam pelayanan konsultasi kesejahteraan keluarga disebabkan oleh Belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan LK3	4	4	16	Tinggi	Pengaktifan kembali LK3	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RSUBK 34	Tingginya jumlah warga negara migran yang bermasalah disebabkan oleh Tidak terfasilitasinya pemulangan warga negara migran ke daerah asalnya	4	4	16	Tinggi	Bekerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pemulangan migran	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 35	Penyediaan makanan tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan permakanan	5	4	20	Tinggi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 36	Penyediaan sandang tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan permakanan	5	4	20	Tinggi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 37	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan alat bantu	5	4	20	Tinggi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 38	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga disebabkan oleh Kurangnya kesadaran keluarga dalam memahami dan menerima kondisi anggota keluarga yang mengalami permasalahan sosial	5	4	20	Tinggi	Mengoptimalkan peran PSKS dalam upaya reunifikasi keluarga	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 39	Tingkat kemandirian PMKS yang masih kurang disebabkan oleh Rendahnya pemberdayaan PMKS	5	4	20	Tinggi	Memaksimalkan peran petugas penanganan sosial	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 40	Tidak terlayannya kejadian darurat PMKS	5	4	20	Tinggi	Memaksimalkan peran petugas penanganan sosial	Memadai	Efektif	Tidak Ada



Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RSUBK 41	Tidak terpenuhinya layanan rujukan bagi PMKS disebabkan oleh Data tidak valid	5	4	20	Tinggi	Memaksimalkan pelayanan pada loket layanan rujukan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 42	Tidak terpenuhinya layanan kedaruratan bagi PMKS disebabkan oleh Kejadian kedaruratan yang tidak dapat diprediksi	5	4	20	Tinggi	Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 43	Penyediaan makanan tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan permakanan	5	4	20	Tinggi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 44	Penyediaan sandang tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan permakanan	5	4	20	Tinggi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 45	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan alat bantu	5	4	20	Tinggi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 46	Tingkat kemandirian PMKS yang masih kurang disebabkan oleh Rendahnya pemberdayaan PMKS	5	4	20	Tinggi	Memaksimalkan peran petugas penanganan sosial	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 47	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga disebabkan oleh Kurangnya kesadaran keluarga dalam memahami dan menerima kondisi anggota keluarga yang mengalami permasalahan sosial	5	4	20	Tinggi	Mengoptimalkan peran PSKS dalam upaya reunifikasi keluarga	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
RSUBK 48	Tidak terlaksananya rehabilitasi sosial PMKS disebabkan oleh Masih kurangnya MoU dengan lembaga-lembaga pelayanan rehabilitasi sosia	5	4	20	Tinggi	Melakukan inventarisasi lembaga-lembaga yang berpotensi untuk melakukan kerjasama	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 49	Tidak terlayannya kebutuhan dasar anak terlantar disebabkan oleh Keterlambatan proses penjangkaran anak terlantar untuk dimasukan kedalam panti odah ngasoh kanak	5	4	20	Tinggi	Melakukan seleksi penerimaan anak asuh untuk ditempatkan pada panti	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 50	DTKS yang belum terverifikasi dan di validasi disebabkan oleh Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS	5	4	20	Tinggi	Meningkatkan peran petugas lapangan dan proses pendataan dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 51	DTKS yang belum terverifikasi dan di validasi disebabkan oleh Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS	5	4	20	Tinggi	Meningkatkan peran petugas lapangan dan proses pendataan dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 52	Tidak terlasurkannya bantuan sosial disebabkan oleh Data penerima manfaat yang belum terverifikasi dan tervalidasi	5	4	20	Tinggi	Melakukan verifikasi dan pembuatan SK Penerima Manfaat	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 53	Tidak terlasurkannya bantuan pengembangan ekonomi disebabkan oleh Tambahan pagu anggaran dari pokok pada P-APBD, proses verifikasi penerima manfaat WRSE terlambat	5	4	20	Tinggi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 54	Penyediaan makanan tidak tepat waktu disebabkan oleh	5	4	20	Tinggi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar	Memadai	Efektif	Tidak Ada

Kode Risiko	Risiko yang teridentifikasi	Analisis Risiko			Kategori/ peringkat risiko	Pengendalian yg sudah ada (Kepatuhan /Aturan/SOP dll)	Existing Pengendalian		Residu (Ada/Tidak)
		Kemungkinan	Dampak	Skor			Memadai/Tidak memadai	Efektif/ Tidak Efektif	
	Keterlambatan proses pengadaan permakanan					tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku			
RSUBK 55	Penyediaan sandang tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan permakanan	5	4	20	Tinggi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 56	Kurang optimalnya pelaksanaan Kampung Siaga Bencana disebabkan oleh Masing rendahnya SMD dalam pengelolaan kampung siaga bencana	3	4	12	Sedang	Melaksanakan Sosialisasi pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 57	Belum optimalnya kinerja Taruna Siaga Bencana disebabkan oleh Kurangnya peningkatan SDM, sarana prasarana serta rewards untuk Taruna Siaga Bencana	3	4	12	Sedang	Melakukan sosialisasi pelaksanaan TAGANA	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 58	Rusaknya Taman Makan Pahlawan disebabkan oleh Tidak terpeliharanya Taman Makan Pahlawan	3	4	12	Sedang	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memadai	Efektif	Tidak Ada
RSUBK 59	Rusaknya Taman Makan Pahlawan disebabkan oleh Tidak terpeliharanya Taman Makan Pahlawan	3	4	12	Sedang	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Memadai	Efektif	Tidak Ada

3.3 Evaluasi Risiko

Tujuan evaluasi risiko adalah membantu proses pengambilan keputusan. Evaluasi risiko meliputi proses perbandingan hasil analisis dari masing-masing risiko terhadap kriteria risiko yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah suatu tindakan lebih lanjut terhadap risiko tersebut diperlukan. Kondisi tersebut mengarah pada keputusan untuk:

- Tidak melakukan apa-apa
- Mempertimbangkan opsi perlakuan risiko
- Melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami risiko lebih baik.
- Mempertahankan pengendalian risiko yang ada
- Mempertimbangkan ulang sasaran proses.

Hasil analisis terhadap risiko yang teridentifikasi pada Perangkat Daerah selanjutnya dilakukan evaluasi dan ditentukan Prioritas Penanganan Risiko Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara seperti Tabel berikut:

3.3.1 Evaluasi Risiko Strategis

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/Dihindari/Dibagi)
RS 1	Data PMKS tidak terverifikasi dan valid disebabkan oleh Keterbatasan kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Sosial	20	Tinggi	1	Mitigasi
RS 1	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan disebabkan oleh Rendahnya kemampuan ASN Dinas Sosial dalam mengimplementasikan SAKIP	16	Tinggi	2	Mitigasi

3.3.2 Evaluasi Risiko Program

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/Dihindari/Dibagi)
RPROG 5	PMKS yang tidak memperoleh layanan perlindungan dan jaminan sosial disebabkan oleh Data PMKS yang belum terverifikasi dan valid ;	20	Tinggi	1	Mitigasi

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/Dihindari/Dibagi)
	terbatasnya sumber daya yang dimiliki				
RPROG 4	Data PMKS yang belum terverifikasi dan valid ; terbatasnya sumber daya yang dimiliki ; tidak tersedianya pangan, sandang dan alat bantu yang akan berikan kepada penerima manfaat	20	Tinggi	2	Mitigasi
RPROG 2	Petugas PSKS kurang aktif dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial disebabkan oleh Kurangnya peningkatan kapasitas PSKS	20	Tinggi	3	Mitigasi
RPROG 6	Korban bencana yang tidak terpenuhi layanan dasarnya disebabkan oleh Terbatasnya sumber daya yang dimiliki ; tidak tersedianya pangan, sandang yang akan berikan kepada penerima manfaat	20	Tinggi	4	Mitigasi
RPROG 3	Warga migran yang tidak dapat dipulangkan disebabkan oleh Terbatasnya sumber daya yang dimiliki	20	Tinggi	5	Mitigasi
RPROG 1	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan disebabkan oleh Rendahnya kemampuan ASN Dinas Sosial dalam mengimplementasikan SAKIP	16	Tinggi	6	Mitigasi
RPROG 7	TMP yang tidak terpelihara disebabkan oleh Pelaksanaan pemeliharaan tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan	6	Rendah	7	Mitigasi

3.3.4 Evaluasi Risiko Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/Dihindari/Dibagi)
RSUBK 51	Tidak tersalurkannya bantuan sosial disebabkan oleh Data penerima manfaat yang belum terverifikasi dan tervalidasi	20	Tinggi	1	Mitigasi

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/Dihindari/Dibagi)
RSUBK 35	Penyediaan makanan tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan permakanan	20	Tinggi	2	Mitigasi
RSUBK 32	DTKS yang belum terverifikasi dan di validasi disebabkan oleh Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS	20	Tinggi	3	Mitigasi
RSUBK 43	Penyediaan makanan tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan permakanan	20	Tinggi	4	Mitigasi
RSUBK 53	Tidak terlasurkannya bantuan pengembangan ekonomi disebabkan oleh keterlambatan proses pengadaan	20	Tinggi	5	Mitigasi
RSUBK 52	Tidak terlasurkannya bantuan sosial disebabkan oleh Data penerima manfaat yang belum terverifikasi dan tervalidasi	20	Tinggi	6	Mitigasi
RSUBK 38	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga disebabkan oleh Kurangnya kesadaran keluarga dalam memahami dan menerima kondisi anggota keluarga yang mengalami permasalahan sosial	20	Tinggi	7	Mitigasi
RSUBK 50	DTKS yang belum terverifikasi dan di validasi disebabkan oleh Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS	20	Tinggi	8	Mitigasi
RSUBK 49	Tidak terlayannya kebutuhan dasar anak terlantar disebabkan oleh Keterlambatan proses penjangkaran anak terlantar untuk dimasukan kedalam panti odah ngasoh kanak	20	Tinggi	9	Mitigasi
RSUBK 36	Penyediaan sandang tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan permakanan	20	Tinggi	10	Mitigasi
RSUBK 37	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu disebabkan oleh	20	Tinggi	11	Mitigasi

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/Dihindari/Dibagi)
	Keterlambatan proses pengadaan alat bantu				
RSUBK 47	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga disebabkan oleh Kurangnya kesadaran keluarga dalam memahami dan menerima kondisi anggota keluarga yang mengalami permasalahan sosial	20	Tinggi	12	Mitigasi
RSUBK 54	Penyediaan makanan tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan permakanan	20	Tinggi	13	Mitigasi
RSUBK 46	Tingkat kemandirian PMKS yang masih kurang disebabkan oleh Rendahnya pemberdayaan PMKS	20	Tinggi	14	Mitigasi
RSUBK 44	Penyediaan sandang tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan permakanan	20	Tinggi	15	Mitigasi
RSUBK 41	Tidak terpenuhinya layanan rujukan bagi PMKS disebabkan oleh Data tidak valid	20	Tinggi	16	Mitigasi
RSUBK 40	Tidak terpenuhinya layanan kedaruratan bagi PMKS disebabkan oleh Kejadian kedaruratan yang tidak dapat diprediksi	20	Tinggi	17	Mitigasi
RSUBK 39	Tingkat kemandirian PMKS yang masih kurang disebabkan oleh Rendahnya pemberdayaan PMKS	20	Tinggi	18	Mitigasi
RSUBK 45	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan alat bantu	20	Tinggi	19	Mitigasi
RSUBK 55	Penyediaan sandang tidak tepat waktu disebabkan oleh Keterlambatan proses pengadaan sandang	20	Tinggi	20	Mitigasi
RSUBK 42	Tidak terpenuhinya layanan kedaruratan bagi PMKS disebabkan oleh Kejadian ke	20	Tinggi	21	
RSUBK 31	Kurangnya kemampuan SDM TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PSKS perorangan disebabkan oleh	16	Tinggi	22	Mitigasi

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/Dihindari/Dibagi)
	Belum maksimalnya pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan kapasitas SDM TKSK				
RSUBK 22	Sanksi Denda / Pemutusan sambungan air, listrik, telepon / internet dan TV kabel disebabkan oleh Keterlambatan pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16	Tinggi	23	Mitigasi
RSUBK 30	Kurangnya kemampuan SDM Pekerja Sosial Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PSKS perorangan disebabkan oleh Belum maksimalnya pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan kapasitas SDM Pekerja Sosial	16	Tinggi	24	Mitigasi
RSUBK 34	Tingginya jumlah warga negara migran yang bermasalah disebabkan oleh Tidak terfasilitasinya pemulangan warga negara migran ke daerah asalnya	16	Tinggi	25	Mitigasi
RSUBK 33	Kurangnya peran LK3 dalam pelayanan konsultasi kesejahteraan keluarga disebabkan oleh Belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan LK3	16	Tinggi	26	Mitigasi
RSUBK 27	Bangunan Gedung yang mengalami kerusakan	16	Tinggi	27	
RSUBK 28	Sarana Prasaran Gedung yang mengalami kerusakan	16	Tinggi	28	
RSUBK 4	Gaji dan Tunjangan ASN yang tidak terbayarkan disebabkan oleh Adanya Penambahan Pegawai, Perubahan Regulasi dan Hilangnya data Base Pegawai /ASN	12	Sedang	29	Mitigasi
RSUBK 23	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL disebabkan oleh Adanya penambahan tenaga harian lepas wakar dan tenaga kebersihan	12	Sedang	30	Mitigasi

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/Dihindari/Dibagi)
RSUBK 20	Tidak terpenuhinya kebutuhan peralatan dan mesin penunjang tugas dan fungsi dinas disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	12	Sedang	31	Mitigasi
RSUBK 24	Terhambatnya aktivitas pengguna kendaraan dinas perorangan dan jabatan disebabkan oleh Pemeliharaan kerusakan yang tidak dapat diprediksi	12	Sedang	32	Mitigasi
RSUBK 25	Tidak maksimalnya pelayanan di lapangan disebabkan oleh Kendaraan dinas operasional / lapangann yang tidak terpelihara	12	Sedang	33	Mitigasi
RSUBK 56	Kurang optimalnya pelaksanaan Kampung Siaga Bencana disebabkan oleh Masing rendahnya SMD dalam pengelolaan kampung siaga bencana	12	Sedang	34	Mitigasi
RSUBK 51	DTKS yang belum tervifikasi dan di validasi disebabkan oleh Kurangnya kemampuan petugas dalam melakukan pendataan DTKS	12	Sedang	35	Mitigasi
RSUBK 58	Rusaknya Taman Makan Pahlawan disebabkan oleh Tidak terpeliharanya Taman Makan Pahlawan	12	Sedang	36	Mitigasi
RSUBK 57	Belum optimalnya kinerja Taruna Siaga Bencana disebabkan oleh Kurangnya peningkatan SDM, sarana prasarana serta rewards untuk Taruna Siaga Bencana	12	Sedang	37	Mitigasi
RSUBK 59	Rusaknya Taman Makan Pahlawan disebabkan oleh Tidak terpeliharanya Taman	12	Sedang	38	Mitigasi
RSUBK 48	Tidak terlaksananya rehabilitasi sosial PMKS disebabkan oleh Masih kurangnya MoU dengan lembaga-lembaga pelayanan rehabilitasi sosial	12	Sedang	39	Mitigasi
RSUBK 6	Laporan BMD yang tidak valid disebabkan	12	Sedang	40	Mitigasi

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/Dihindari/Dibagi)
	oleh Asset yang tidak tercatat				
RSUBK 26	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan peralatan / mesin disebabkan oleh Peralatan dan mesin yang tidak dipelihara/dirawat	12	Sedang	41	Mitigasi
RSUBK 9	Data ASN yang tidak update disebabkan oleh Belum semua data ASN terkumpul menjadi database	12	Sedang	42	Mitigasi
RSUBK 17	Kehilangan dokumen arsip yang diperlukan disebabkan oleh Tidak tertatanya arsip pada dinas sosial	12	Sedang	43	Mitigasi
RSUBK 18	Tidak terlaksanannya sistem pemerintahan berbasis elektronik	12	Sedang	44	Mitigasi
RSUBK 7	Barang Milik Daerah yang tidak tercatat	12	Sedang	45	Mitigasi
RSUBK 10	Tidak terpenuhinya 20 Jam Pelajaran untuk setiap ASN	12	Sedang	46	Mitigasi
RSUBK 12	Kemampuan OPD yang belum dapat memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	9	Rendah	47	Mitigasi
RSUBK 16	Perjalanan dinas yang tidak efisien dan efektif disebabkan oleh Perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan	9	Rendah	48	Mitigasi
RSUBK 29	Tidak terbitnya Izin Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang	9	Rendah	49	Mitigasi
RSUBK 8	Keterlambatan penyediaan pakaian	6	Rendah	50	
RSUBK 5	Laporan Berkala Belum Memberikan Keyakinan Yang Wajar disebabkan oleh Laporan Terlambat Dikumpulkan	6	Rendah	51	Diterima
RSUBK 1	Terlambatnya penyelesaian Dokumen Perencanaan disebabkan oleh Bahan dan Data untuk penyusunan dokumen belum tersedia	6	Rendah	52	Mitigasi
RSUBK 2	Laporan Sakip, E-Pantau, LPPD belum	6	Rendah	53	Mitigasi

Kode Risiko	Risiko Yang Teridentifikasi	Nilai Skor	Kategori Risiko	Peringkat Risiko	Keputusan Perlakuan Risiko (Diterima, Mitigasi/Dihindari/Dibagi)
	dapat di nilai dengan baik disebabkan oleh Kurangnya Koordinasi Antar Bidang				
RSUBK 3	Laporan Evaluasi Kinerja tidak tersedia secara berkala	6	Rendah	54	Mitigasi
RSUBK 14	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetak dan Penggandaan disebabkan oleh Proses belanja pengadaan barang yang tidak sesuai dengan rencana	4	Sangat Rendah	55	Diterima
RSUBK 13	Kurang terpenuhinya Bahan Logisti Kantor disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan logistik yang dibutuhkan	4	Sangat Rendah	56	Diterima
RSUBK 15	Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan / material pendukung kegiatan disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta keterlambatan belanja bahan material yang dibutuhkan	4	Sangat Rendah	57	Dierima
RSUBK 11	Pencahayaan ruangan kerja dan lingkungan kantor tidak baik disebabkan oleh Tidak tersedia komponen instalasi listrik dan penerangan	4	Sangat Rendah	58	Diterima
RSUBK 21	Terlambatnya proses administrasi yang membutuhkan meterai, dll disebabkan oleh Perhitungan kebutuhan yang tidak tepat serta ketersediaan anggaran belanja jasa surat menyurat yang tidak sesuai	4	Sangat Rendah	59	Diterima

3.5 Peta Risiko

Berdasarkan Hasil Evaluasi Risiko, disusun Peta Risiko Perangkat Daerah

3.5.1 Peta Penurunan Level Risiko Strategis

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

Keterangan :

- RS 1 = Risiko Strategis 1 = Data PMKS tidak terverifikasi dan valid disebabkan oleh Keterbatasan kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Sosial
- RS 2 = Risiko Strategis 2 = Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan disebabkan oleh Rendahnya kemampuan ASN Dinas Sosial dalam meng-implementasi-kan SAKIP

3.5.2 Peta Penurunan Level Risiko Program

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

Keterangan :

A = RPROG1	= Risiko Program 1	= Penyusunan LKJIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan
B = RPROG2, RPROG3	= Risiko Program 2	= Petugas PSKS kurang aktif dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan social
C = RPROG4, RPROG5, RPROG6,	Risiko Program 3 = Risiko Program 4	= Warga migran yang tidak dapat dipulangkan = Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial yang tidak terpenuhi
	Risiko Program 5	= PMKS yang tidak memperoleh layanan perlindungan dan jaminan social
D = RPROG7	Risiko Program 6 = Risiko Program 7	= Korban bencana yang tidak terpenuhi layanan dasarnya = Taman Makam Pahlawan (TMP) yang tidak terpelihara

3.5.3 Peta Penurunan Level Risiko Kegiatan/Sub Kegiatan

Matriks Peta Risiko						
Kemungkinan	5	5	10	15	J 20 L	25
	4	A 4	8	12 G	H 16 I	K 20
	3	3	C 6 B	D 9 E	12 F	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
	Dampak					

BAB IV RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RISIKO

4.1 Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada sasaran Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis yang dilakukan, selanjutnya dilakukan pendampingan terhadap perlakuan risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Perangkat Daerah dengan Hasil seperti Tabel berikut:

4.1.1 Rencana Tindak Pengendalian Risiko Strategis

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
RS 1	Data PMKS tidak terverifikasi dan valid disebabkan oleh Keterbatasan kemampuan Sumber Daya yang dimiliki Dinas Sosial	20	Mitigasi	Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kebutuhan Pelayanan Dasar PMKS	Januari s/d Desember	- Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin - Sub Koord Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas - Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial - Kepala Bidang Jaminan Sosial
RS 2	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan disebabkan oleh Rendahnya kemampuan ASN Dinas Sosial dalam mengimplementasi-kan SAKIP	16	Diterima	Menugaskan PNS yang berkompeten untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	Januari s/d Desember	- Sekretaris - Sub Koord Penyusunan Program dan Keuangan

4.2 Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Program

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
RPROG 1	Penyusunan LKjIP yang belum memenuhi standar untuk pencapaian nilai yang ditargetkan	16	Mitigasi	Menugaskan PNS yang berkompeten untuk mengikuti sosialisasi, bimbingan teknis penyusunan perencanaan dan pelaporan kinerja	Januari 2024 s/d Desember 2024	Sekretaris dan Sub Koord Penyusunan Program dan Keuangan
RPROG 2	Petugas PSKS kurang aktif dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial	20	Mitigasi	Memberikan fasilitasi kepada PSKS dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan sosial	Januari 2024 s/d Desember 2024	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
RPROG 3	Warga migran yang tidak dapat dipulangkan	20	Mitigasi	Melakukan koordinasi dengan pihak terkait pemulangan warga migran bermasalah ke tempat asalnya	Januari 2024 s/d Desember 2024	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
RPROG 4	Pelayanan Dasar Rehabilitasi Sosial yang tidak terpenuhi	20	Mitigasi	Sinkronisasi data penerima manfaat bantuan sosial dengan penyalur bantuan	Januari 2024 s/d Desember 2024	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
RPROG 5	PMKS yang tdk memperoleh layanan	20	Mitigasi	Sinkronisasi data penerima manfaat bantuan sosial dengan penyalur bantuan	Januari 2024 s/d Desember 2024	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial

	perlindungan dan jaminan sosial					
RPROG 6	Korban bencana yang tidak terpenuhi layanan dasarnya	20	Mitigasi	Melakukan pengendalian terhadap stockopname / barang persediaan gudang	Januari 2024 s/d Desember 2024	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
RPROG 7	TMP yang tidak terpelihara	6	Mitigasi	Penerimaan dan sekaligus penempatan tenaga kebersihan / perawatan TMP sesuai dengan kebutuhan	Januari 2024 s/d Desember 2024	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial

4.3. Respon Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko pada Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
RSUBK 1	Terlambatnya penyelesaian Dokumen Perencanaan	6	Mitigasi	1. Melakukan revaluasi RENJA. 2. Penyusunan KAK. 3. Mengikuti regulasi terkait perencanaan	Peb;Maret;Juni;Agustus;September	Sekretaris/PPTK
RSUBK 2	Laporan Sakip, E-Pantau, LPPD belum dapat di nilai dengan baik	6	Mitigasi	Rapat pengendalian kinerja internal Dinas Sosial	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 3	Laporan Evaluasi Kinerja tidak tersedia secara berkala	6	Diterima	Rapat Evaluasi Secara Berkala	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 4	Gaji dan Tunjangan ASN yang tidak terbayarkan	12	Mitigasi	Koordinasi dengan BPKAD dalam rangka rekonsiliasi gaji dan tunjangan ASN	Mei, Juni	Sekretaris/PPTK
RSUBK 5	Laporan Berkala Belum Memberikan Keyakinan Yang Wajar	6	Diteirima	Rapat evaluasi internal	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 6	Laporan BMD yang tidak valid	12	Mitigasi	Penyusunan rekapitulasi belanja modal yang menjadi asset Dinas Sosial per triwulan	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 7	Barang Milik Daerah yang tidak tercatat	12	Mitigasi	Pendataan barang milik daerah	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 8	Keterlambatan penyediaan pakaian	6	Diterima	Percepatan Proses Pengadaan	Januari s/d April	Sekretaris/PPTK
RSUBK 9	Data ASN yang tidak update	12	Mitigasi	Memaksimalkan penggunaan aplikasi My SAPK	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 10	Tidak terpenuhinya 20 Jam Pelajaran untuk setiap ASN	12	Mitigasi	Membuat Analisis Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM ASN	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 11	Pencapaian ruangan kerja dan lingkungan kantor tidak baik	4	Diteirima	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Maret;Juli;Nopember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 12	Kemampuan OPD yang belum dapat memenuhi kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9	Mitigasi	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Januari, Maret	Sekretaris/PPTK
RSUBK 13	Kurang terpenuhinya Bahan Logisti Kantor	4	Diteirima	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Maret;Juni;September; Desember	Sekretaris/PPTK

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
RSUBK 14	Tidak terpenuhinya semua Barang Cetakan dan Peggandaan	4	Diteirma	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 15	Tidak terpenuhinya kebutuhan bahan / material pendukung kegiatan	4	Diteirma	Melakukan inventarisasi kebutuhan	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 16	Perjalanan dinas yang tidak efisien dan efektif	9	Mitigasi	Membuat kartu kendali perjalanan dinas	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 17	Kehilangan dokumen arsip yang diperlukan	12	Mitigasi	Pendampingan dari Dinas Kearsipan dalam pengelolaan arsip	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 18	Tidak terlaksananya sistem pemerintahan berbasis elektronik	12	Mitigasi	Membuat aplikasi berbasis website	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 19	Kebutuhan meubelair yang tidak tersedia	6	Diterima	Percepatan Proses Penga	Januari s/d April	Sekretaris/PPTK
RSUBK 20	Tidak terpenuhinya kebutuhan perlatan dan mesin penunjang tugas dan fungsi dinas	12	Mitigasi	Membuat Rencana Kebutuhan Barang dan Mesin	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 21	Terlambatnya proses administrasi yang membutuhkan meterai, dll	12	Diteirma	Penggunaan bahan surat dan benda pos secara efisien	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 22	Sanksi Denda / Pemutusan sambungan air, listrik, telepon / internet dan TV kabel	16	Mitigasi	Melakukan perhitungan ulang kebutuhan sampai akhir tahun	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 23	Kekurangan pagu anggaran pembayaran gaji THL	12	Mitigasi	Memastikan ketersediaan dana untuk pembayaran gaji THL	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 24	Terhambatnya aktivitas pengguna kendaraan dinas perorangan dan jabatan	12	Mitigasi	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan kendaraan	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 25	Tidak maksimalnya pelayanan di lapangan	12	Mitigasi	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan kendaraan	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 26	Terganggunya aktifitas / kinerja yang membutuhkan perlaatan / mesin	12	Mitigasi	Membuat kartu kendali perbaikan / perawatan peralatan dan mesin	Januari s/d Desember	Sekretaris/PPTK
RSUBK 27	Bangunan Gedung yang mengalami kerusakan	16	Mitigasi	Melakukan Percepatan Proses Pengadaan Jasa Pemeliharaan	Januari s/d April	Sekretaris/PPTK
RSUBK 28	Sarana Prasarana Gedung yang mengalami kerusakan	16	Mitigasi	Melakukan Percepatan Proses Pengadaan Jasa Pemeliharaan	Januari s/d April	Sekretaris/PPTK
RSUBK 29	Tidak terbitnya Izin Undian dan Pengumpulan Uang atau Barang	9	Mitigasi	Menakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dan study tiru pengembangan KAT	Januari s/d Desember	Bidang Pemberdayaan Sosial/PPTK
RSUBK 30	Kurangnya kemampuan SDM Pekerja Sosial Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	16	Mitigasi	Rapat Koordinasi dengan Pekerja Sosial	Januari s/d Desember	Bidang Pemberdayaan Sosial/PPTK

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
	sebagai PSKS perorangan					
RSUBK 31	Kurangnya kemampuan SDM TKSK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PSKS perorangan	16	Mitigasi	Rapat Koordinasi dengan TKSK	Januari s/d Desember	Bidang Pemberdayaan Sosial/PPTK
RSUBK 32	DTKS yang belum terverifikasi dan di validasi	16	Mitigasi	Rapat Koordinasi dengan PUSKESOS	Januari s/d Desember	Bidang Pemberdayaan Sosial/PPTK
RSUBK 33	Kurangnya peran LK3 dalam pelayanan konsultasi kesejahteraan keluarga	16	Mitigasi	Pengaktifan kembali LK3	Januari s/d Desember	Bidang Pemberdayaan Sosial/PPTK
RSUBK 34	Tingginya jumlah warga negara migran yang bermasalah	16	Mitigasi	Bekerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pemulangan migran	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 35	Penyediaan makanan tidak tepat waktu	20	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 36	Penyediaan sandang tidak tepat waktu	20	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 37	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu	20	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 38	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga	20	Mitigasi	Mengoptimalkan peran PSKS dalam upaya reunifikasi keluarga	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 39	Tingkat kemandirian PMKS yang masih kurang	20	Mitigasi	Memaksimalkan peran petugas penanganan sosial	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 40	Tidak terlayannya kejadian darurat PMKS	20	Mitigasi	Memaksimalkan peran petugas penanganan sosial	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 41	Tidak terpenuhinya layanan rujukan bagi PMKS	20	Mitigasi	Memaksimalkan pelayanan pada loket layanan rujukan	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 42	Tidak terpenuhinya layanan kedaruratan bagi PMKS	20	Mitigasi	Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (TRC)	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 43	Penyediaan makanan tidak tepat waktu	20	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 44	Penyediaan sandang tidak tepat waktu	20	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 45	Penyediaan alat bantu tidak tepat waktu	20	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK

Kode Risiko	Risiko	Skor	Perlakuan	Rencana Tindak Pengendalian	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana Pengendalian
RSUBK 46	Tingkat kemandirian PMKS yang masih kurang	20	Mitigasi	Memaksimalkan peran petugas penanganan sosial	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 47	Kegagalan dalam upaya reunifikasi keluarga	20	Mitigasi	Mengoptimalkan peran PSKS dalam upaya reunifikasi keluarga	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 48	Tidak terlaksananya rehabilitasi sosial PMKS	12	Mitigasi	Melakukan inventarisasi lembaga-lembaga yang berpotensi untuk melakukan kerjasama	Januari s/d Desember	Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK
RSUBK 49	Tidak terlayannya kebutuhan dasar anak terlantar	20	Mitigasi	Melakukan seleksi penerimaan anak asuh untuk ditempatkan pada panti	Januari s/d Desember	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/PPTK
RSUBK 50	DTKS yang belum terverifikasi dan di validasi	20	Mitigasi	Meningkatkan peran petugas lapangan dan proses pendataan dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan	Januari s/d Desember	Bidang Penanganan Fakir Miskin/PPTK
RSUBK 51	DTKS yang belum terverifikasi dan di validasi	20	Mitigasi	Meningkatkan peran petugas lapangan dan proses pendataan dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis pendataan	Januari s/d Desember	Bidang Penanganan Fakir Miskin/PPTK
RSUBK 52	Tidak terlasurkannya bantuan sosial	20	Mitigasi	Melakukan verifikasi dan pembuatan SK Penerima Manfaat	Januari s/d Desember	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/PPTK
RSUBK 53	Tidak terlasurkannya bantuan pengembangan ekonomi	20	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Januari s/d Desember	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/PPTK
RSUBK 54	Penyediaan makanan tidak tepat waktu	20	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Januari s/d Desember	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/PPTK
RSUBK 55	Penyediaan sandang tidak tepat waktu	20	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Januari s/d Desember	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/PPTK
RSUBK 56	Kurang optimalnya pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	12	Mitigasi	Melaksanakan Sosialisasi pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Januari s/d Desember	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/PPTK
RSUBK 57	Belum optimalnya kinerja Taruna Siaga Bencana	12	Mitigasi	Melakukan sosialisasi pelaksanaan TAGANA	Januari s/d Desember	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial/PPTK
RSUBK 58	Rusaknya Taman Makan Pahlawan	12	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Januari s/d Desember	Bidang Pemberdayaan Sosial/PPTK
RSUBK 59	Rusaknya Taman Makan Pahlawan	12	Mitigasi	Surat Edaran Kepala Dinas untuk proses pengadaan barang agar tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Januari s/d Desember	Bidang Pemberdayaan Sosial/PPTK

BAB V MONITORING

5.1 Pemantauan Risiko

Pendampingan penyusunan Jadwal Pemantauan Pelaksanaan Rencana Tidak Pengendalian Risiko pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada Tabel berikut:

5.1.1 Pemantauan RTP Risiko Strategis

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas lapangan terkait entry data / updating data pada aplikasi SIKS-NG ; - Memberikan Rewards kepada petugas pendata dan pengelolaan data	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	- Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin / Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas - Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial - Bidang Jaminan Sosial	Kepala Dinas
- Melakukan rapat monitoring evaluasi dan pengendalian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	- Sekretaris dan Sub Koord Penyusunan Program dan Keuangan	

5.1.2 Pemantauan RTP Risiko Program

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Melakukan rapat monitoring evaluasi dan pengendalian	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris/PPTK	Kepala Dinas
Monitoring dan Evaluasi PSKS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial/PPTK	Kepala Dinas
Koordinasi dengan stakeholder terkait dan Dinas Sosial lintas daerah	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK	Kepala Dinas
Membuat aplikasi lokal untuk mem-back up aplikasi SIKS-NG KEMENSOS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial/PPTK	Kepala Dinas
Melakukan verifikasi dan validasi DTKS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin/PPTK	Kepala Dinas

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana (KSB)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial/PPTK	Kepala Dinas
Melaksanakan pekerjaan pemeliharaan secara swakelola	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial/PPTK	Kepala Dinas

5.1.3 Pemantauan RTP Risiko Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
BA kesepakatan antara RKPD dengan hasil penyusunan Renja SKPD		√	√			√		√	√				Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Surat penyampaian laporan hasil entry e-pantau secara berkala	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Rekonsiliasi Gaji dengan Bidang Anggaran BPKAD					√	√							Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Validasi hasil laporan keuangan berkala	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Pengurus Barang melakukan rekonsiliasi dengan Bendahara Pengeluaran dan mencatat setiap belanja asset dalam laporan barang			√			√			√			√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Surat pengantar penyerahan dokumen kepegawaian semua ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Pemeliharaan yang baik dan pengadaan alat penerangan yang berkualitas dan sesuai standar Nasional.			√				√				√		Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Penggunaan peralatan dan perlengkapan yang efektif dan efisien	√	√	√										Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Penyaluran bahan logistik yang sesuai dan tepat waktu, efektif dan efisien			√			√			√			√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Tanda terima penyerahan barang cetakan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Menginventarisir kebutuhan bahan material secara selektif agar efektif dan efisien	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Melakukan inventarisir jadwal undangan / kegiatan yang akan dihadiri	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Menyusun arsip dokumen sesuai dengan kodefikasi dan mengamankannya dari gangguan alam dan manusia.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Rapat evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Melakukan efisiensi dalam proses surat menyurat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Melakukan perhitungan ulang kebutuhan pembayaran rekening sampai akhir tahun	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Melakukan perhitungan ulang kebutuhan pembayaran gaji THL untuk diajukan tambahan pada P-APBD						√							Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Pengecekan dan perawatan secara kontinyu peralatan tersebut	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk pemeliharaan gedung kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Mengoptimalkan anggaran yang ada untuk pemeliharaan gedung kantor	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sekretaris / PPTK	Sekretaris / PPTK
Memaksimalkan peran PSKS dalam penanganan KAT	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK
Melakukan konsolidasi dengan seluruh Pekerja Sosial	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK
Melakukan konsolidasi dengan seluruh TKSK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK

Rencana Tindak pengendalian Tambahan	Waktu Pelaksanaan (Bulan)												Pelaksana Pengendalian (Pihak yg melaksanakan RTP)	Pemilik Risiko/Penanggung jawab Risiko
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Melakukan konsolidasi dan seluruh PUSKESOS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK
Selektif dalam menempatkan personil yang bertugas di LK3	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK	Kabid Pemberdayaan Sosial / PPTK
Koordinasi lintas sektor terkait pemulangan warga migran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
Mengoptimalkan peran petugas sosial di lapangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
Melakukan kunjungan ke tempat PMKS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
Melakukan rekapitulasi hasil pemberian rujukan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
Memastikan kesiapan Tim	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan kebutuhan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
Melakukan kunjungan ke tempat PMKS	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK
Mengoptimalkan peran petugas sosial di lapangan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK	Kabid Rehabilitasi Sosial / PPTK

